

Press Release**“Subsidi BBM, Politik Fiskal, dan Ekonomi Rakyat”**

Jakarta, 28 Maret 2012

Kantor INDEF

Pemerintah nampaknya mengambil keputusan yang sudah pasti dalam isu bahan bakar minyak (BBM), yakni menaikkan harga minyak menjadi Rp 6000/liter. Dalam APBN-P 2012 yang dibahas bersama dengan Badan Anggaran DPR, postur anggaran diubah sebagai berikut: (i) defisit dipatok 2,23% dari PDB atau setara Rp 190 triliun; dengan rincian pendapatan negara dan hibah Rp 1.358 triliun dan belanja negara Rp 1.548 triliun; (ii) pemberian subsidi BBM sebesar Rp 137 triliun, subsidi listrik Rp 65 triliun, dan cadangan risiko fiskal energi Rp 23 triliun; dan (iii) dana kompensasi dianggarkan Rp 30,6 triliun. Dengan kesepakatan tersebut berarti pemerintah memiliki ruang untuk menaikkan harga BBM. Dengan pilihan itu ada beberapa hal prinsipal yang layak untuk dicatat.

Pertama, subsidi yang dianggarkan dalam APBN makin lama porsinya kian menciut. Subsidi energi (minyak dan listrik) pada 2004 masih 23,21% dan turun menjadi 18,8% (APBN-P 2012), sedangkan subsidi non-energi (pangan, pupuk, benih, dan lain-lain) pada 2004 sebesar 7,57% yang turun menjadi 3,8% (APBN-P 2012) terhadap belanja pemerintah pusat (setelah dikurangi dengan dana transfer daerah). Deskripsi ini menunjukkan bahwa narasi subsidi memang hendak dikurangi dan dihilangkan secara sistematis oleh pemerintah, sebab yang berkurang bukan hanya subsidi energi tapi juga subsidi non-energi.

Kedua, politik fiskal pemerintah makin menjauh dari upaya untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. APBN periode 2004-2012 rata-rata tumbuh 19,05% dan belanja pemerintah pusat tumbuh 16,6%; tapi belanja pegawai tumbuh 19,6% dan belanja barang tumbuh 38% pada periode yang sama. Ini artinya, politik fiskal selama ini hanya untuk menyantuni birokrasi, bukan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, argumen bahwa subsidi sebagian besar dinikmati oleh kelompok kaya menjadi kurang bermakna karena struktur APBN sendiri justru menunjukkan alokasi yang sedemikian besar untuk birokrasi.

Ketiga, kesejahteraan ekonomi masyarakat pasti akan terpuak dengan kenaikan harga BBM ini karena harga-harga barang merangkak naik, bahkan sebelum kebijakan kenaikan BBM diumumkan pemerintah. Contoh, sebelum ada rencana kenaikan BBM, harga cabai rawit Rp 22.000/kg, minyak goreng curah dan gula masing-masing Rp 9.500/kg; tapi begitu isu kenaikan BBM berhembus harga itu sudah naik menjadi Rp 32.000 (cabai rawit, naik 45%), Rp 11.000 untuk minyak curah dan gula (naik 15,8%) [Kompas, 27 Maret 2012]. Kenaikan harga ini dipastikan akan bertambah tinggi lagi jika harga BBM nantinya benar-benar dinaikkan seperti yang dimau pemerintah.

Di sisi lain, data BPS (2011) menunjukkan jika pengeluaran masyarakat dibagi dalam 10 kelas (desil), maka akan dijumpai data sebagai berikut: pengeluaran terendah kelompok pertama dan kedua, yakni sekitar Rp 153 ribu dan 204 ribu/kapita/bulan, pada 2010 hanya tumbuh 9,08% dan 8,25%. Sebaliknya, pengeluaran tertinggi kelompok pertama dan kedua, yaitu sekitar 1,48 juta dan Rp 768 ribu/kapita/bulan, pada tahun yang sama tumbuh 15,36% dan 18,77%. Dengan begitu, mereka yang pengeluarannya besar boleh dikatakan pertumbuhan pendapatannya dua kali lipat dibandingkan dengan kelompok miskin.

Bagaimana dampaknya terhadap makroekonomi?. Dengan asumsi kenaikan BBM sebesar Rp 1500/liter, simulasi yang dilakukan INDEF menghasilkan proyeksi sebagai berikut: (i) pertumbuhan ekonomi merosot menjadi 5,8%. Penurunan pertumbuhan ekonomi ini antara lain disebabkan oleh investasi yang jatuh (akibat kenaikan suku bunga kredit); (ii) inflasi melonjak 3-4% sehingga daya beli masyarakat jatuh, di mana kaum miskin daya belinya berkurang sekitar 10-15%; (iii) jumlah kemiskinan meningkat 1,1-1,3% (sekitar 1,5 juta penduduk) akibat penurunan daya beli, meskipun aneka skema kompensasi sudah dijalankan; (iv) secara keseluruhan pendapatan nasional/PDB berkurang Rp 125 triliun dibandingkan apabila BBM tidak dinaikkan (sehingga pertumbuhan ekonomi 6,5%). Dampak tersebut masih bisa diteruskan efeknya terhadap kenaikan pengangguran, penurunan ekspor, dan lain sebagainya.

Dengan deskripsi tersebut, sebetulnya manfaat yang diperoleh dari kebijakan kenaikan harga BBM lebih kecil ketimbang biaya sosial ekonomi yang harus ditanggung oleh perekonomian (dan rakyat). INDEF merekomendasikan agar kenaikan harga BBM ditunda dan pemerintah melakukan 5 agenda strategis terlebih dulu sebelum harga BBM dinaikkan. Lima agenda tersebut adalah:

- Politik fiskal harus menunjukkan pemihakan kepada masyarakat, bukan untuk kepentingan birokrasi, pembayaran utang, dan fasilitasi korupsi. APBN yang sehat ditunjukkan oleh kriteria-kriteria tersebut.
- Reforma agraria yang sudah dicanangkan sejak 4 tahun lalu harus dilaksanakan dan dituntaskan, sehingga rata-rata luas lahan rumah tangga petani menjadi 2 hektar.
- Struktur tenaga kerja harus diupayakan menjadi pekerja formal (sekitar 75%) dan sisanya pekerja informal dengan jalan menumbuhkan sektor pertanian dan industri (berbasis pertanian dan SDA) dan pelaku UMKM.
- Moratorium pembangunan pasar modern dan mendongkrak/memerkuat pelaku pasar tradisional.
- Mengembalikan penguasaan pengelolaan SDA kepada negara dan swasta asing dan domestik diberi peran maksimal 20%. Pengembangan energi alternatif telah dijalankan dan infrastruktur BBG (dan yang lain) sudah memadai.

Sarwo Edhie (+62813 8047 7878)